

ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENINGKATAN POTENSI UNGGULAN DESA OELETSALA KECAMATAN TAEBENU KABUPATEN KUPANG

Oleh

Jeremy Risdianto Gilbert Bilaut

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana

E-mail: jerrybilaut09@gmail.com

Article History:

Received: 10-12-22025

Revised: 19-12-2025

Accepted: 13-01-2026

Keywords: Pemerintah Desa, Potensi Unggulan, Pertanian, Pemberdayaan, Desa Oeletsala.

Abstract: Penelitian ini membahas peran Pemerintah Desa Oeletsala dalam peningkatan potensi unggulan desa, khususnya pada sektor pertanian sebagai sumber penghidupan utama masyarakat. Kajian teoritis berlandaskan pada teori pembangunan, pembangunan ekonomi, pembangunan pertanian, konsep kesejahteraan, serta peran pemerintah menurut perspektif ekonomi publik. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif sebagaimana dikemukakan Creswell dan Sugiyono, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Informan penelitian meliputi aparat desa, tokoh masyarakat, dan petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa menjalankan tiga peran utama, yaitu sebagai regulator dalam penyusunan kebijakan dan peraturan desa, sebagai fasilitator dalam penyediaan pelatihan, sarana pendukung, serta akses pemasaran, dan sebagai dinamisor dalam mendorong partisipasi masyarakat serta kolaborasi dengan pihak luar. Pengembangan potensi unggulan pertanian telah memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan masyarakat, meskipun masih terdapat kendala seperti infrastruktur yang terbatas, akses pasar yang belum optimal, serta keterbatasan teknologi pertanian. Secara umum, penelitian ini menyimpulkan bahwa peran pemerintah desa telah berjalan baik namun perlu diperkuat agar pengembangan potensi unggulan dapat berkelanjutan dan berdampak lebih luas terhadap kesejahteraan masyarakat.

PENDAHULUAN

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal, hidup bergotong-royong, adat istiadat yang sama, tata norma dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan. Di samping itu, umumnya wilayah

Desa terdiri atas daerah pertanian, sehingga sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani dan berdagang. Desa sebagai pemerintahan terendah dapat membuka kesempatan kepada rakyat untuk berperan aktif dalam pembangunan desanya. Hal tersebut merupakan wujud konsekuensi dari demokrasi. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan Kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri dalam suatu penyelenggaraan, artinya kesatuan masyarakat hukum tersebut memiliki otonomi. Namun demikian, otonomi yang melekat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa bukanlah otonomi seperti yang dimiliki pemerintahan Provinsi, Kota, maupun Kabupaten, akan tetapi merupakan otonomi yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat, Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa "Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/ atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transportasi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKPDesa). RPJMDesa Oeletsala ini merupakan rencana strategis Desa untuk mencapai tujuan dan cita-cita Desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang member kesempatan kepada Desa untuk melaksanakan kegiatan Perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good governance*) seperti partisipatif transparan, dan akuntabilitas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu enam tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, serta program-program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja. Penyusunan dokumen RPJM Desa di Desa Oeletsala memiliki tujuan utama agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dalam skala desa selama lima tahun ke depan, serta mampu menyelaraskan kebijakan pembangunan di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Dokumen ini juga dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa serta sebagai rujukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Oeletsala. Selain itu,

RPJM Desa memiliki berbagai manfaat penting, seperti menjamin kesinambungan pembangunan, menjadi rencana induk pembangunan desa yang dapat menjadi acuan bagi seluruh kegiatan pembangunan, memberikan arah yang jelas terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan di desa, menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang kemudian diselaraskan dengan program pembangunan dari pemerintah, serta mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa. Dengan adanya RPJM Desa, diharapkan pembangunan di Desa Oeletsala dapat terlaksana secara terencana, terpadu, dan partisipatif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam menjalankan kewenangan berdasarkan prinsip otonomi desa, Pemerintah Desa Oeletsala menghadapi berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Di bidang pertanian dan ketahanan pangan, belum adanya pengembangan kebun bibit hijauan pakan ternak serta ketiadaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan hasil pertanian menjadi kendala utama dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor ini. Sementara itu, pada bidang koperasi dan usaha kecil menengah, lemahnya pembinaan dana kredit desa, belum tersedianya pasar desa sebagai pusat distribusi hasil usaha warga, serta minimnya pengelolaan kelompok usaha produktif turut memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal. Di bidang kesehatan, tantangan muncul dari belum adanya program pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif, terbatasnya penyuluhan tentang keluarga berencana, serta tidak meratanya jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal jauh dari puskesmas pembantu. Masalah juga ditemukan dalam sektor pendidikan, seperti rendahnya kontribusi dalam penyediaan dan perawatan sarana pendidikan termasuk gedung, meubel, laboratorium, dan perpustakaan minimnya dukungan untuk pendidikan luar sekolah, serta belum terselenggaranya pelatihan atau kursus keterampilan bagi warga. Sementara di bidang sosial, kurangnya pembinaan terhadap masyarakat lokal sebagai pemilik sumber daya genetik dan lemahnya pendataan penyandang masalah sosial serta potensi kesejahteraan sosial menunjukkan belum optimalnya upaya perlindungan dan pemberdayaan sosial. Beragam persoalan ini menggambarkan bahwa meskipun otonomi desa telah memberikan ruang bagi desa untuk mengatur urusannya sendiri, namun tanpa dukungan kapasitas, perencanaan yang matang, serta sinergi antar lembaga, berbagai kewenangan tersebut sulit dijalankan secara maksimal dan berkelanjutan.

Penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama dalam peran pemerintah desa, yaitu sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisor dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa untuk peningkatan potensi unggulan Desa Oelatsala. Sebagai regulator, pemerintah desa berperan dalam menyusun kebijakan serta mensosialisasikan aturan dan pedoman yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Hal ini mencakup pemberian arahan kebijakan yang jelas serta sosialisasi program kerja yang dilakukan secara terbuka kepada masyarakat desa agar pelaksanaan program dana desa berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Selanjutnya, dalam perannya sebagai fasilitator, pemerintah desa dituntut untuk mampu memahami kebutuhan masyarakat dan merumuskannya dalam bentuk program kerja yang menyentuh langsung pada aspek pembangunan, baik berupa pembangunan infrastruktur fisik maupun pengembangan sumber daya manusia sebagai investasi jangka panjang bagi kemajuan desa. Sementara itu, sebagai dinamisor, pemerintah desa berperan penting dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan program kerja,

mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Peran ini tercermin dalam kemampuan pemerintah desa untuk membuka ruang dialog, mendengar keluhan dan aspirasi warga terkait pengelolaan dana desa, serta memberikan motivasi agar masyarakat turut terlibat dan berkontribusi dalam menggali serta mengembangkan potensi unggulan desa yang ada. Ketiga aspek ini menjadi dasar dalam menganalisis seberapa besar peran pemerintah desa dalam mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk mendorong pembangunan dan kemandirian Desa Oeletsala. Dalam bidang sosial dan tata kelola pemerintah di Desa Oeletsala, pemerintah desa dalam merancang pengajuan peraturan desa (Perdes) membutuhkan partisipasi masyarakat karena bertujuan untuk memastikan bahwa Perdes yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Peraturan Desa adalah suatu keputusan masyarakat desa yang dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban masyarakat, serta menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan kehendak dan aspirasi masyarakat. Peraturan yang berlaku di Desa Oeletsala merupakan aspirasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengajuan Perdes juga merupakan bentuk jaminan keberlangsungan demokrasi di tingkat Desa, partisipasi masyarakat juga merupakan penerapan prinsip transparansi dalam pembentukan Perdes. Prinsip partisipasi masyarakat dalam pengajuan Perdes menuntut agar masyarakat diberdayakan dan diberi kesempatan untuk berperan dalam proses birokrasi. Ada satu Peraturan Desa yang diajukan oleh Masyarakat yakni Peraturan Desa Tentang Penyelenggara Desa Inklusi Desa Oeletsala Tahun 2023. Selain partisipasi masyarakat pemerintah Desa Oeletsala juga bekerjasama dengan BPD dalam proses pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa (Donald Finit, dkk., 2025). Sedangkan dalam bidang ekonomi hasil perkebunan dan peternakan merupakan sumber penghasilan terbesar bagi masyarakat di desa tersebut. Karena sebagian besar masyarakat Desa Oeletsala bekerja sebagai petani sayur dan juga peternak dari penghasilan tersebut masyarakat dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga mereka. Sehingga peneliti ingin meneliti sejauh mana peran pemerintah desa dalam meningkatkan potensi unggulan desa sesuai dengan ketiga aspek diatas.

Peneliti melakukan penelitian ini karena topik tersebut bertujuan untuk pembangunan nasional yang berfokus pada pembangunan desa. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan dan memiliki peran strategis dalam memberdayakan masyarakat. Melalui kebijakan yang tepat dan pengelolaan yang baik, desa bisa berkembang dengan memaksimalkan potensi yang ada. Dengan memahami peran pemerintah desa, peneliti berharap dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan dan program yang ada dapat lebih efektif. Pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam mempercepat kemajuan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal. Setiap desa memiliki potensi unggulan yang berbeda, baik itu dalam hal pertanian, kerajinan tangan, pariwisata, atau budaya. Dalam bidang ekonomi Desa Oeletsala memiliki potensi SDA tertentu, seperti pertanian. Pemerintah desa dapat berperan dalam memfasilitasi pengelolaan SDA secara berkelanjutan dan meningkatkan produktivitasnya. Misalnya, hasil pertanian unggulan seperti jagung, sayur-sayuran, lombok atau tomat pemerintah desa dapat mendukung petani dengan pelatihan dan akses ke pasar yang lebih luas untuk itu pemerintah desa harus memperhatikan

(Infrastruktur Ekonomi) pengembangan infrastruktur yang mendukung perekonomian, seperti perbaikan jalan, fasilitas pasar, dan sistem distribusi barang, akan meningkatkan akses masyarakat ke pasar dan memperlancar kegiatan ekonomi. karena di desa tersebut sangat perlu meningkatkan infrastruktur desa seperti jalan raya yang kurang memungkinkan masyarakat dalam mengakses hasil pertanian mereka ke pasar besar. Di Desa Oeletsala, peneliti melihat bahwa salah satu potensi unggulan terbesar yaitu dalam bidang pertanian, melihat bahwa tanah yang begitu subur masyarakat di desa tersebut mengelolah tanah mereka menjadi lahan perkebunan. Petani disana menanam tomat, lombok, ubi kayu, jagung, dan juga sayur-sayuran untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di desa tersebut. Dengan mengangkat potensi unggulan ini, pemerintah desa dapat menciptakan peluang ekonomi baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi angka kemiskinan. Penelitian ini dapat membantu menggali informasi mengenai peran pemerintah desa tersebut lebih dalam dan memberikan rekomendasi yang tepat untuk membantu kemajuan Desa Oeletsala.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai peneltian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti dengan penjelasan secara terperinci tentang permasalahan yang berhubungan dengan teori dan data yang ada, sehingga mendapat suatu kesimpulan (Suyanto 2005). Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Potensi Unggulan Desa Oeletsala. Di samping itu juga akan dibahas tentang faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan program tersebut.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai peran pemerintah desa dalam peningkatan potensi unggulan desa Oeletsala. Pendekatan ini sangat sesuai untuk menganalisis fenomena sosial yang bersifat kompleks, di mana data yang diperoleh tidak hanya berupa angka tetapi juga berfokus pada pengalaman, pandangan, dan perspektif masyarakat serta pihak terkait lainnya. Menurut Creswell (2014), pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan memvisualisasikan fenomena sosial yang terjadi dalam konteks tertentu. Dalam konteks ini, fenomena yang dimaksud adalah upaya pemerintah desa Oeletsala dalam mengembangkan potensi unggulannya. Melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif, peneliti dapat menggali berbagai informasi tentang kebijakan dan program yang telah dijalankan oleh pemerintah desa dalam pengembangan potensi unggulan tersebut.

Pada penelitian ini Analisis data yang digunakan untuk memproses, menilai, dan menganalisis data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi adalah Proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman (1984).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana peran pemerintah desa dalam peningkatan potensi unggulan desa oeletsala kecamatan taebenu kabupaten kupang. Potensi unggulan yang diteliti dalam penelitian ini adalah pertaniann yang merupakan komoditas

unggulan di Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.

Pengembangan Potensi Unggulan desa

Pengembangan potensi unggulan Desa Oeletsala merupakan langkah strategis dalam mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki. jika dikelola dengan baik dapat menjadi sektor unggulan yang bernilai ekonomi tinggi.

Informan bapak In Bilaut selaku Kepala Desa Oeletsala menyampaikan bahwa kebijakan yang dibuat bertujuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi lokal.

"Untuk sementara ini sudah ada beberapa kebijakan yang dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan potensi desa dan juga kesejahteraan masyarakat di bidang pertanian dan peternakan,. hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan perannya dalam menetapkan arah pembangunan desa dengan menjadikan potensi unggulan sebagai prioritas utama.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa unntuk penyusunan kebijakan, pemerintah desa juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Ia menyampaikan bahwa sosialisasi dilakukan baik di kantor desa maupun dengan turun langsung ke lapangan secara berkala setiap enam bulan sekali. Namun demikian, informan juga menilai bahwa aspek sosialisasi masih perlu diperbaiki, terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk aktif mengikuti kegiatan desa.

"Yang harus diperbaiki yaitu di bidang sosialisasi dengan cara memperbaiki pola pikir masyarakat desa tentang pentingnya mengikuti sosialisasi desa karena hasilnya juga dapat berguna bagi kesejahteraan masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa meskipun sosialisasi telah dilakukan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan".

Dari sisi fasilitasi, informan bapak Yanson Tasae selaku sekretaris Desa Oeletsala menyampaikan bahwa pemerintah desa lebih banyak memfokuskan kegiatan pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat.

"Selama ini kami lebih banyak melakukan pembangunan infrastruktur fisik dan pengembangan sumber daya manusia karena itu sangat dibutuhkan masyarakat. Untuk program pendampingan memang masih terbatas dan ke depan perlu lebih ditingkatkan, hal ini menunjukkan adanya kesadaran aparat desa terhadap keterbatasan pelaksanaan program pendampingan dalam pengembangan potensi unggulan".

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pentingnya dukungan anggaran dalam pengembangan potensi unggulan desa.

"Dari dana desa yang ada, sekitar 20 persen dialokasikan untuk mendukung pengembangan potensi unggulan di bidang pertanian dan peternakan, jadi dana tersebut digunakan sesuai dengan program yang telah disepakati bersama masyarakat, alokasi anggaran tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi secara bertahap".

Sementara itu, informan bapak Noldy Sakau selaku KASI Pemerintahan menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat dalam mendukung program desa tergolong aktif dan pemerintah desa selalu memberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi.

"Setiap kali ada sosialisasi, pemerintah desa selalu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi, pemerintah desa telah memberikan dukungan

melalui alokasi dana desa sebesar 20 persen untuk pengembangan potensi unggulan. Dukungan tersebut dirasakan cukup membantu petani dalam meningkatkan kegiatan pertanian dan pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa”.

Pemerintah Desa Oelatsala sedang fokus pada pengembangan tiga aspek potensi unggulan desa yaitu di bidang pertanian, peternakan, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sektor pertanian menjadi tulang punggung utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan penghasilan, sementara bidang peternakan turut berperan penting dalam menopang perekonomian lokal. Di sisi lain, pengembangan UMKM memberikan peluang bagi masyarakat untuk berinovasi dan mengolah hasil alam menjadi produk bernilai tambah. Melalui pengelolaan yang terencana dan berkelanjutan, ketiga sektor unggulan ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa oelatsala secara menyeluruh.

1. Bidang Pertanian

Sektor pertama yang menjadi fokus pengembangan potensi unggulan di Desa Oelatsala adalah sektor pertanian. Dalam sektor ini, pemerintah desa berperan aktif melalui berbagai bentuk dukungan, antara lain pemberian bantuan material berupa bibit, pupuk, obat-obatan pertanian, serta penyediaan sarana air melalui pembangunan sumur bor. Selain itu, pemerintah desa juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak eksternal, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dari perusahaan petrokimia, guna memperkuat kapasitas petani dalam pengelolaan pertanian yang berkelanjutan. Lebih lanjut, pada tahun 2025 pemerintah desa merencanakan pelaksanaan program ketahanan pangan yang mengalokasikan sebesar 20% dari dana desa untuk pengembangan tanaman hortikultura, seperti tomat, sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan diversifikasi hasil pertanian masyarakat.

Informan bapak Daniel Bilaut sebagai petani Desa Oelatsala mengatakan bahwa dana dari desa sangat dapat membantu dan meningkatkan baik perekonomian desa maupun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

“Untuk bantuan seperti bibit alat dan irigasi, kami petani di desa oelatsala sangat terpenuhi melalui program kerja desa kami kelompok petani membuat proposal kemudian diajukan di kantor desa lalu pada tahun berikutnya dana yang disalurkan ke pemerintah desa kemudian di berikan kepada kelompok tani sebesar 20% untuk dikelola dalam pengembangan pertanian di desa oelatsala.”

Tanaman pertanian yang dibudidayakan oleh masyarakat di Desa Oelatsala meliputi tomat, cabai, terung, labu, dan sawi. Di antara berbagai jenis tanaman tersebut, tomat menjadi komoditas unggulan karena didukung oleh kondisi topografi serta kesesuaian lahan yang sangat baik untuk pertumbuhannya.

Informan bapak Matias Bilaut sebagai petani tomat mengatakan bahwa pengelolaan potensi tomat di Desa Oelatsala memang sangat baik.

“Di desa ini tomat kami sangat subur dan dari semua komoditas pertanian, tanaman tomat adalah tanaman yang selalu bagus hasil panennya sehingga desa oelatsala bisa disebut juga desa tomat.”

Faktor lingkungan yang mendukung tersebut menjadikan tanaman tomat lebih mudah dibudidayakan dan menghasilkan kualitas panen yang optimal di wilayah desa tersebut.

2. Bidang peternakan

Pada tahun 2017 dan 2018, pemerintah Desa Oelatsala melaksanakan program pengadaan sapi bagi para peternak sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas sektor peternakan. Selain itu, pemerintah desa juga menjalin komunikasi dengan anggota dewan serta Dinas Peternakan guna memperoleh dukungan dan bantuan tambahan bagi kelompok peternak di wilayah desa. Sementara itu, pada sektor peternakan ayam, pemerintah desa memberikan perhatian khusus melalui pengadaan sarana air bersih dan pembangunan saluran pipa untuk kebutuhan air minum ternak ayam. Sebagai bentuk dukungan tambahan, pemerintah desa juga menurunkan harga air bagi peternak dengan tujuan meningkatkan efisiensi biaya produksi serta mengoptimalkan hasil peternakan di Desa Oelatsala.

Menurut informan bapak In Bilaut sebagai kepala Desa Oelatsala mengatakan bahwa pemerintah oelatsala terus menjalin komunikasi dan juga kerja sama dengan pihak lain yang siap membantu meningkatkan potensi unggulan desa.

"Saya sebagai kepala desa sudah meminta kerja sama dan juga membuka bagi setiap lembaga yang ingin memberikan bantuan atau dukungan kepada desa oelatsala khususnya bidang peternakan, kami akan selalu terbuka dan melayani pihak terkait agar kedepan peternakan di desa oelatsala semakin meningkat dan juga membuka peluang bagi para peternak agar dapat meningkatkan hasil ternak dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat."

Salah satu komoditas peternakan unggulan di Desa Oelatsala adalah ternak babi dan sapi. Keunggulan kedua jenis ternak ini didasari oleh faktor budaya dan tradisi masyarakat setempat, di mana babi dan sapi memiliki peran penting dalam kegiatan adat, pesta, serta acara sosial lainnya. Nilai sosial tersebut berdampak pada tingginya permintaan pasar, baik untuk konsumsi lokal maupun penjualan ke wilayah lain. Selain itu, harga jual yang relatif stabil membuat usaha peternakan babi dan sapi memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan terhadap pendapatan rumah tangga petani-peternak di desa.

Menurut informan saudara Tri Putra sebagai peternak babi mengatakan bahwa di desa oelatsala ternak selain di jual ke wilayah lain, ternak juga dikonsumsi untuk acara adat dan juga acara lain di desa.

"yang saya ketahui di desa ini ternak yang paling banyak dikembangkan yaitu hewan babi dan sapi sedangkan peternakan ayam masih sangat sedikit karena kurangnya pengalaman dan juga keinginan dari masyarakat untuk memelihara ternak ayam itu sendiri sangat minim"

Selain itu, Try Pura menjelaskan bahwa hewan yang dipelihara di daerah tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk dijual, tetapi juga dipelihara sebagai persiapan dalam pelaksanaan acara adat.

"kami masyarakat di kampung memelihara hewan ternak tidak hanya untuk dijual tetapi kami juga bertujuan untuk nanti digunakan jika ada pesta pernikahan, kedukaan dan acara adat di desa"

Selain faktor sosial dan ekonomi, kondisi alam Desa Oelatsala juga menjadi pendukung utama dalam pengembangan sektor peternakan. Wilayah desa yang memiliki lahan kering dengan ketersediaan hijauan pakan alami sangat sesuai untuk budidaya ternak sapi. Sementara itu, limbah pertanian dan sisa makanan rumah tangga dapat dimanfaatkan sebagai pakan babi, sehingga menekan biaya pemeliharaan. Kombinasi antara kondisi lingkungan yang mendukung dan ketersediaan sumber pakan lokal menjadikan ternak babi dan sapi sebagai komoditas unggulan yang berpotensi terus dikembangkan di Desa Oelatsala.

3. Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Oeletsala, terdapat dua jenis produk yang dikembangkan oleh pemerintah desa, yaitu produk kain tenun dan produk makanan berupa keripik ubi. Pemerintah desa memberikan dukungan terhadap pengembangan kedua produk tersebut.

Pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Oelatsala, pemerintah desa mengembangkan dua jenis produk unggulan, yaitu kain tenun dan keripik ubi. Kedua produk ini dipilih karena didukung oleh potensi sumber daya lokal serta keterampilan masyarakat yang telah ada sejak lama. Pengembangan kedua jenis usaha ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal yang bernilai jual tinggi.

Produk kain tenun tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai budaya yang penting bagi masyarakat Desa Oelatsala. Kain tenun merupakan hasil karya yang mencerminkan identitas dan tradisi masyarakat setempat. Oleh karena itu, pemerintah desa berupaya mendorong pengembangan usaha tenun sebagai bentuk pelestarian warisan budaya sekaligus memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat luas. Selain itu, kain tenun memiliki daya tarik tinggi di pasar karena sering dijadikan sebagai kerajinan tangan dan cendera mata khas daerah.

Sementara itu, produk keripik ubi dikembangkan karena permintaan pasar yang tinggi terhadap makanan olahan lokal. Proses produksinya relatif sederhana dan dapat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri di rumah tanpa memerlukan teknologi tinggi. Pemerintah desa turut berperan aktif dalam mendukung pengembangan kedua produk tersebut melalui pemberian pelatihan, bantuan peralatan produksi, serta promosi melalui media sosial. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas jangkauan pemasaran, serta memperkuat perekonomian masyarakat Desa Oelatsala.

Kolaborasi Pemerintah Desa Oeletsala, Petani dengan Pihak Luar

Pemerintah Desa Oeletsala, menyadari bahwa peningkatan potensi unggulan desa tidak dapat dilakukan secara mandiri kecuali dengan membangun kolaborasi. Oleh karena itu, pemerintah desa membangun kolaborasi yang kuat dengan masyarakat, khususnya kelompok petani, serta berbagai pihak eksternal seperti dinas pertanian, lembaga swasta, dan lembaga pendukung lainnya. Pemerintah desa menginisiasi kolaborasi dengan mengajukan proposal bantuan alat pertanian, bibit, pupuk, dan ternak kepada dinas teknis, serta menghadirkan penyuluh pertanian untuk memberikan pendampingan dalam teknik budidaya. Peran ini mencerminkan unsur *government* dalam *Triple helix* yang berfungsi sebagai fasilitator kebijakan dan penyedia ruang kolaboratif. Kelompok petani dan pelaku UMKM mewakili unsur *industry*, yakni aktor ekonomi yang menjalankan produksi dan menerima langsung manfaat kolaborasi. Mereka memanfaatkan bantuan bibit, pupuk, alat, serta mengikuti pelatihan dan pendampingan teknis dari penyuluh. Sementara itu, pihak luar seperti Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, lembaga swasta, serta perguruan tinggi berperan sebagai *knowledge institutions* yang menyediakan inovasi, teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Menurut informan bapak Yansen Tasae sebagai sekretaris desa mengatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa, petani, dan pihak luar sudah berjalan, terutama dengan dinas pertanian.

"sejauh ini kolaborasi antara pemerintah desa, petani, dan pihak luar sudah mulai berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Kami sebagai aparat desa berperan aktif sebagai penghubung antara kelompok tani dengan dinas pertanian Kabupaten Kupang. Setiap tahun kami mengajukan proposal bantuan alat dan bibit, serta mengundang penyuluh pertanian untuk memberikan pendampingan teknis. Selain itu, belum lama ini pemerintah desa juga mendapat bantuan dari mahasiswa KKN dengan cara membantu petani dalam hal administrasi kelompok dan pelatihan pengolahan hasil pertanian. Namun, kolaborasi ini masih bersifat sementara dan belum terjadwal secara rutin"

Selain itu bapak Stevanus Manunel selaku kepala dusun satu Desa Oeletsala mengatakan bahwa

"Dari pengalaman saya, kolaborasi yang dibangun masih bersifat jangka pendek. Misalnya, ketika ada bantuan dari dinas atau proyek tertentu, maka kegiatan bersama dilakukan. Namun setelah program selesai, jarang ada tindak lanjut. Padahal, petani di wilayah kami sangat membutuhkan pendampingan berkelanjutan agar dapat menerapkan pengetahuan baru dengan benar. Pemerintah desa sudah berupaya menghubungi beberapa lembaga swasta yang bergerak di bidang pertanian, tetapi karena keterbatasan anggaran dan jaringan, kerja sama belum bisa berjalan maksimal. Kami berharap ke depan ada perjanjian kersama antara pemerintah desa dengan pihak luar agar kolaborasi lebih terarah dan berkelanjutan."

Kolaborasi antara pemerintah desa dan kelompok petani diwujudkan melalui pembentukan kelompok tani yang berfungsi sebagai wadah komunikasi dan koordinasi. Melalui kelompok ini, petani dapat menyampaikan kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi kepada pemerintah desa secara langsung. Pemerintah desa kemudian menindak lanjuti dengan mengajukan proposal bantuan ke instansi terkait, seperti dinas pertanian dan peternakan kabupaten. Pola kerja sama ini membantu meningkatkan efektivitas program karena didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat.

Selain bekerja sama dengan petani, pemerintah Desa Oeletsala juga menjalin hubungan kemitraan dengan pihak luar, seperti lembaga pemerintah daerah, swasta. Pemerintah desa berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Kupang untuk memperoleh bantuan bibit unggul, pupuk, serta pelatihan teknis bagi petani. Kerja sama juga dilakukan dengan Dinas Peternakan dalam bentuk bantuan ternak sapi dan babi bagi kelompok peternak. Melalui kemitraan ini, kapasitas petani dalam mengelola lahan dan ternak semakin meningkat.

Menurut Bapak Romerus Olbata selaku petani, kolaborasi yang telah terjalin sudah berjalan dengan baik, namun pendampingan biasanya hanya dilakukan pada saat musim tanam. Beliau berharap kegiatan pendampingan tersebut dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahun.

"Sebagai petani yang sudah lama menggarap lahan ubi dan jagung, saya merasa kolaborasi antara pemerintah desa dan pihak luar cukup membantu. Kami mendapat bantuan bibit dan pupuk dari dinas pertanian berkat pengajuan dari pemerintah desa, penyuluh pertanian juga sering datang untuk memberikan arahan cara menanam yang baik. Namun, pendampingan hanya dilakukan pada musim tanam tertentu. Kami berharap kegiatan seperti itu bisa berlanjut setiap tahun agar kami bisa memperbaiki cara bercocok tanam dan meningkatkan hasil panen."

Menurut bapak Hanri Futbae sebagai petani mengatakan bahwa kerja sama yang dilakukan dengan pihak luar harus lebih sering dilakukan.

"Kami mendapat bantuan pupuk dan bibit dari pemerintah desa lewat kerja sama dengan dinas pertanian, tapi belum rutin setiap tahun. Kalau bisa, pendampingan teknisnya lebih sering sehingga hasil tanam juga lebih bagus."

Selain itu, Bapak Abel Riwu selaku petani mengungkapkan bahwa persaingan di pasar cukup ketat, terutama dengan pedagang dari daerah lain yang datang dan sering kali menurunkan harga jual hasil pertanian.

"Saya merasa kolaborasi ini sudah ada, tapi masih belum maksimal. Kami memang mendapat bantuan dari pemerintah desa, tetapi dalam hal pemasaran hasil panen, kami masih kesulitan. Kadang harga anjlok karena persaingan di pasar dengan penjual dari daerah lain. Kalau bisa, dari saya sebagai petani berharap pemerintah desa dapat memperhatikan hal ini dan dapat membantu kami."

Pemerintah desa juga berupaya memperkuat kolaborasi dalam hal pemasaran hasil produksi. Untuk meningkatkan nilai jual hasil pertanian dan produk lokal seperti kain tenun dan keripik ubi, pemerintah desa bekerja sama dengan pihak swasta dan pelaku usaha di tingkat kabupaten. Produk-produk unggulan tersebut dipromosikan melalui media sosial, pameran lokal, serta kerja sama dengan toko-toko kecil dan koperasi desa. Kolaborasi ini membantu memperluas jaringan pemasaran sehingga produk Desa Oeletsala dapat dikenal oleh masyarakat yang lebih luas.

Di sisi lain, kolaborasi dengan pihak eksternal juga mencakup pendampingan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM). Pemerintah desa bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan penyuluh pertanian untuk memberikan pelatihan mengenai teknik budidaya modern, pengelolaan hasil pertanian, serta manajemen usaha kecil. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dalam mengelola potensi unggulan desa secara mandiri dan berkelanjutan.

Menurut bapak desa In Bilaut, beliau menyampaikan bahwa akan terus menjalin kerja sama dengan semua pihak luar agar dapat mendorong hasil unggulan desa supaya berkembang lebih cepat.

"Sebagai kepala desa, saya melihat kolaborasi yang sudah terbangun merupakan langkah positif menuju kemandirian ekonomi masyarakat. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dan penghubung antara petani, pelaku UMKM, dan pihak eksternal seperti dinas pertanian, universitas, dan lembaga swasta. Kami mendorong terbentuknya kelompok usaha bersama agar komunikasi lebih mudah dilakukan. Namun kami juga menyadari masih ada tantangan dalam menjaga keberlanjutan kerja sama. Kami terus berupaya memperkuat jaringan dengan pemerintah kabupaten dan lembaga nonpemerintah agar potensi unggulan desa, terutama di bidang pertanian dan peternakan, dapat berkembang lebih cepat."

Dengan terjalinnya kolaborasi yang baik antara pemerintah desa, petani, dan pihak luar, pembangunan di Desa Oeletsala dapat berjalan lebih efektif dan berkesinambungan. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat sektor pertanian dan peternakan, tetapi juga mendorong tumbuhnya UMKM berbasis potensi lokal. Sinergi tersebut mencerminkan prinsip pembangunan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, sementara pemerintah desa dan pihak eksternal berperan sebagai fasilitator dan pendukung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pembahasan Hasil Penelitian

Strategi Pengelolaan Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Unggulan Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa, petani, dan tokoh masyarakat, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Oeletsala telah menjalankan perannya dalam pengembangan potensi unggulan desa, khususnya pada sektor pertanian dan peternakan dan UMKM. Peran tersebut diwujudkan melalui kebijakan, program pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan. Temuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan potensi dan kearifan lokal.

Dalam kerangka berpikir penelitian ini, peran pemerintah desa sebagai regulator terlihat melalui penyusunan kebijakan dan perencanaan desa yang memprioritaskan pengembangan potensi unggulan. Pemerintah Desa Oeletsala telah menetapkan kebijakan yang mendukung sektor pertanian, peternakan dan UMKM sebagai basis ekonomi masyarakat. Menurut Ndraha Taliziduhu (2003) yang menyatakan bahwa pemerintah berperan sebagai regulator melalui fungsi pengaturan, penetapan kebijakan, dan penciptaan ketertiban dalam proses pembangunan. Dengan adanya regulasi tersebut, pengembangan potensi unggulan desa memiliki arah yang jelas dan memiliki kepastian hukum. Sebagai regulator, pemerintah desa menetapkan kebijakan pembangunan melalui RPJMDes dan RKPDes yang menempatkan sektor pertanian, peternakan, dan UMKM sebagai prioritas pembangunan. Regulasi tersebut mengatur arah pemanfaatan sumber daya lokal, pembentukan kelompok tani dan kelompok ternak, serta tata kelola lahan agar kegiatan produksi berjalan tertib dan tidak menimbulkan konflik sosial maupun kerusakan lingkungan. Penetapan kebijakan ini menjadi dasar dalam merumuskan strategi pembangunan berbasis potensi lokal. Berikut beberapa fungsi dari peran regulator yang sudah dilakukan pemerintah desa.

1. Fungsi Regulasi

tercermin dari adanya kebijakan desa yang telah disusun untuk meningkatkan potensi unggulan desa, khususnya di bidang pertanian dan peternakan. Informan menyampaikan bahwa pemerintah desa telah membuat sejumlah kebijakan yang bertujuan mendorong peningkatan produktivitas sekaligus kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan program pembangunan desa yang berorientasi pada pengembangan potensi lokal.

2. Fungsi Pengawasan

terlihat dari pelaksanaan sosialisasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa, baik melalui pertemuan di kantor desa maupun dengan turun langsung ke lapangan. Sosialisasi ini dilaksanakan secara berkala setiap enam bulan sekali dan disertai dengan pemberian ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya menetapkan kebijakan, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program melalui mekanisme komunikasi dua arah dengan masyarakat.

3. Fungsi Perlindungan

diwujudkan melalui keterbukaan pemerintah desa dalam menampung keluhan masyarakat terkait pengembangan potensi unggulan desa. Informan menyatakan

bahwa setiap kegiatan sosialisasi selalu disertai dengan forum diskusi, sehingga masyarakat dapat menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Praktik ini mencerminkan upaya pemerintah desa dalam melindungi kepentingan masyarakat agar tidak dirugikan dalam proses pembangunan desa.

4. **Fungsi Fasilitasi**

tercermin dari upaya pemerintah desa dalam menyediakan dukungan bagi masyarakat, terutama melalui pembangunan infrastruktur fisik dan pengembangan sumber daya manusia. Kedua aspek ini dinilai sebagai kegiatan yang paling sering dilakukan oleh pemerintah desa. Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa bantuan program-program pendampingan masih perlu ditingkatkan agar masyarakat, khususnya petani, dapat lebih optimal dalam mengelola potensi unggulan desa.

5. **Fungsi Alokasi Dan Distribusi**

terlihat dari dukungan pemerintah desa melalui pengalokasian dana desa sebesar 20% untuk mendukung peningkatan potensi unggulan desa. Alokasi anggaran ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam mendistribusikan sumber daya ke sektor-sektor produktif yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2015) Peran pemerintah desa sebagai fasilitator tercermin dari penyediaan sarana dan prasarana pendukung, pengembangan sumber daya manusia, serta pengalokasian dana desa untuk kegiatan produktif masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa mengalokasikan sekitar 20 persen dana desa untuk mendukung pengembangan potensi unggulan. Pemerintah dalam pembangunan berperan sebagai fasilitator yang menyediakan kemudahan, akses sumber daya, dan dukungan agar masyarakat mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara mandiri.

Menurut Sondang Siagian (2008) Selain sebagai regulator dan fasilitator, pemerintah desa juga menjalankan peran sebagai dinamisator, yaitu sebagai penggerak partisipasi dan motivator masyarakat dalam pembangunan desa. Hal ini tercermin dari pelaksanaan sosialisasi kebijakan, musyawarah desa, serta keterbukaan pemerintah desa dalam menerima aspirasi dan keluhan masyarakat. Pemerintah berfungsi sebagai dinamisator pembangunan dengan mendorong, memotivasi, dan menggerakkan partisipasi masyarakat agar terlibat aktif dalam proses pembangunan

Meskipun Pemerintah Desa Oeletsala telah menunjukkan komitmen dalam pengembangan potensi unggulan desa melalui kebijakan, sosialisasi, dan dukungan anggaran, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya dirancang dan dilaksanakan secara optimal. Salah satu hal yang belum dilakukan secara maksimal adalah penyusunan program pendampingan teknis yang berkelanjutan bagi petani dan pelaku usaha desa. Pendampingan yang ada masih bersifat umum dan belum terstruktur dalam jangka panjang, sehingga kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi unggulan secara mandiri masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa sebagai fasilitator belum sepenuhnya mencapai tahap pemberdayaan yang berkelanjutan sebagaimana diharapkan dalam teori pembangunan desa.

Selain itu, hingga saat ini pemerintah Desa Oeletsala juga belum memiliki mekanisme evaluasi dan pengawasan program yang terdokumentasi secara sistematis dalam pengembangan potensi unggulan desa. Evaluasi program masih dilakukan secara informal

melalui forum sosialisasi dan musyawarah desa, sehingga belum mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat keberhasilan program yang telah dijalankan. Di sisi lain, strategi penguatan partisipasi masyarakat juga belum dirancang secara khusus untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa sebagai regulator dan dinamisator masih perlu diperkuat, terutama dalam hal perencanaan evaluatif dan strategi penggerakan masyarakat agar pengembangan potensi unggulan desa dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Oeletsala telah menjalankan perannya sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator sebagaimana tercantum dalam kerangka berpikir penelitian dan teori pemerintah desa. Ketiga peran tersebut saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan dalam pengembangan potensi unggulan desa. Namun, menurut pandangan Todaro dan Smith (2011) tentang pembangunan yang menekankan keberlanjutan dan partisipasi, diperlukan penguatan pada aspek sosialisasi, pendampingan, dan penggerakan masyarakat agar pengembangan potensi unggulan desa dapat memberikan dampak yang lebih optimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi pengelolaan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga menjalankan peran partisipatif dan kolaboratif. Dengan menggabungkan fungsi regulatif, fasilitatif, dan dinamisatif, pemerintah desa mampu menciptakan sinergi antarsektor dan memperkuat kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi unggulan desa secara berkelanjutan.

Strategi pengelolaan yang dilaksanakan melalui peran pemerintah desa sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator terbukti memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Oeletsala. Penerapan strategi yang terarah dan berbasis partisipasi masyarakat telah meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan, memperkuat usaha UMKM, serta membuka peluang ekonomi baru bagi warga. Masyarakat merasakan peningkatan pendapatan, akses terhadap pelatihan, dan keterampilan usaha yang lebih baik. Selain itu, tumbuhnya rasa percaya diri, kemandirian ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup menjadi indikator bahwa strategi pengelolaan potensi unggulan turut berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang belum optimal dilaksanakan oleh pemerintah desa. Program pendampingan teknis dan pemberdayaan masyarakat belum berjalan secara maksimal, terutama dalam mendukung petani agar mampu mengelola potensi unggulan secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi masih perlu ditingkatkan melalui strategi komunikasi yang lebih intensif dan berkelanjutan. Keterbatasan pada aspek pendampingan dan sosialisasi ini menunjukkan perlunya penguatan strategi pemerintah desa agar pengembangan potensi unggulan desa dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dampak Kolaborasi Pemerintah Desa, Petani, dan Pihak Luar Dalam Meningkatkan Potensi Unggulan Desa

Menurut Creswell (2016) menyatakan bahwa keberhasilan sebuah program sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif para pemangku kepentingan dalam proses identifikasi

masalah dan perumusan solusi. Kolaborasi yang dilakukan pemerintah desa menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapat berjalan secara top-down, tetapi memerlukan proses partisipatif yang melibatkan masyarakat sebagai aktor utama. Pengembangan potensi unggulan di Desa Oeletsala memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Potensi unggulan yang meliputi sektor pertanian, peternakan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat sekaligus pendorong utama pertumbuhan ekonomi desa. Ketiga sektor tersebut membentuk sistem ekonomi yang saling terintegrasi, di mana hasil pertanian menjadi bahan baku bagi kegiatan UMKM, sementara peternakan berperan sebagai penopang kebutuhan pangan dan sumber pendapatan tambahan bagi keluarga. Sinergi antar sektor ini tidak hanya meningkatkan produktivitas masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi desa secara menyeluruh.

Dalam sektor pertanian, kolaborasi antara pemerintah desa, petani, dan dinas pertanian diwujudkan melalui program bantuan sarana produksi serta pelatihan teknik budidaya yang lebih efisien. Petani dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Menurut Sugiyono (2019), bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Melalui pendekatan kolaboratif tersebut, para petani di Oeletsala dapat mengoptimalkan lahan pertanian untuk meningkatkan hasil panen dan kualitas produksi.

Kolaborasi dalam pengembangan potensi unggulan Desa Oeletsala juga membawa dampak sosial yang signifikan. Masyarakat menunjukkan peningkatan partisipasi, solidaritas, dan rasa tanggung jawab dalam mengelola potensi desa. Todaro dan Smith (2011), menyatakan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari kenaikan pendapatan, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup, kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, dan akses terhadap peluang ekonomi. Melalui kerja sama lintas pihak, masyarakat semakin memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha, memahami kebutuhan pasar, dan memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal.

Kolaborasi yang terjalin antara Pemerintah Desa Oeletsala, kelompok petani, dan pihak luar memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan potensi unggulan desa, terutama pada sektor pertanian, peternakan, dan UMKM. Penerapan kebijakan pembangunan desa tidak hanya dilakukan dari atas kebawah, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat dan lembaga pendukung dari luar desa. Keterlibatan tiga aktor ini menunjukkan bahwa pengembangan potensi unggulan tidak dapat berjalan optimal apabila hanya dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan sinergi antarpihak dalam bentuk kolaborasi yang terencana dan berkelanjutan.

a. Bentuk Kolaborasi yang Diterapkan di Desa Oeletsala

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa bentuk kolaborasi nyata yang diterapkan di Desa Oeletsala, antara lain:

1. Kolaborasi Teknis dan Produksi

- a. Bantuan bibit jagung, ubi, dan hortikultura dari Dinas Pertanian melalui proposal yang diajukan pemerintah desa.
- b. Pendampingan penyuluh pertanian dalam teknik budidaya, penanaman, dan pengendalian hama.

- c. Bantuan ternak sapi dan babi dari Dinas Peternakan untuk memperkuat potensi peternakan.
2. Kolaborasi dalam Peningkatan Kapasitas SDM
 - a. Pelatihan pengolahan hasil panen dan manajemen usaha kecil.
 - b. Keterlibatan mahasiswa KKN dalam pembinaan administrasi kelompok tani dan UMKM.
 - c. Pendampingan rutin (meskipun belum berkelanjutan) dalam peningkatan teknik bercocok tanam.
3. Kolaborasi dalam Pemasaran dan Promosi Produk
 - a. Kerja sama dengan pihak swasta dan pelaku usaha lokal untuk memasarkan produk pertanian dan UMKM.
 - b. Pemanfaatan media sosial dan pameran desa/kabupaten untuk memperkenalkan produk unggulan seperti tenun dan keripik ubi.
 - c. Penguatan jaringan pemasaran melalui koperasi desa.
4. Kolaborasi dalam Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan Desa
 - a. Kelompok tani dan pelaku UMKM dilibatkan dalam musyawarah desa untuk mengusulkan kebutuhan, seperti bibit, pupuk, alat pertanian, atau pelatihan.
 - b. Pemerintah desa merespons masukan tersebut dan mengintegrasikannya ke dalam RPJMDes dan RKPDes.

Secara keseluruhan, kolaborasi antara pemerintah desa, petani, dan pihak luar terbukti memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat Desa Oeletsala. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan pendapatan dan memperluas peluang usaha, tetapi juga memperkuat nilai-nilai sosial seperti gotong royong, inovasi, dan kemandirian ekonomi. Sinergi ini mencerminkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat serta kemitraan antar-lembaga dalam mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya saing.

Pada sektor peternakan, kolaborasi terjalin antara pemerintah desa, kelompok ternak, dan Dinas Peternakan Kabupaten Kupang. Pemerintah desa membantu menyalurkan bantuan hewan ternak sapi, babi, dan ayam serta memfasilitasi pembentukan kelompok ternak agar kegiatan dapat terorganisir dengan baik. Selain itu, lembaga eksternal turut memberikan pendampingan teknis terkait pakan, kesehatan ternak, dan manajemen usaha peternakan. Bentuk kerja sama ini memberikan dampak positif bagi peningkatan produktivitas peternak serta memperluas peluang ekonomi di masyarakat.

Sementara itu, dalam sektor UMKM, kolaborasi antara pemerintah desa, pelaku usaha lokal, dan pihak luar menjadi salah satu strategi penting dalam pengembangan produk unggulan desa. Pemerintah desa tidak hanya memberikan pelatihan dan bimbingan teknis, tetapi juga bekerja sama dengan lembaga swasta dan instansi pemerintah daerah untuk memasarkan produk lokal seperti kain tenun dan keripik ubi. Promosi dilakukan melalui pameran, media sosial, dan kemitraan dengan pelaku usaha di tingkat kabupaten. Kolaborasi lintas pihak ini memperkuat posisi produk UMKM Oeletsala di pasar dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa.

Dengan adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah desa, petani, dan pihak luar, pengembangan potensi unggulan Desa Oeletsala dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan. Kolaborasi ini tidak hanya menghasilkan peningkatan pendapatan dan

kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat nilai-nilai sosial seperti gotong royong, kemandirian, dan tanggung jawab bersama dalam membangun desa. Melalui sinergi antar pihak, strategi pemerintah desa dalam mengembangkan potensi unggulan mampu mewujudkan perekonomian lokal yang mandiri, berdaya saing, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintah Desa Oeletsala dalam meningkatkan potensi unggulan desa telah diarahkan melalui penyusunan kebijakan desa, pelaksanaan sosialisasi, penyediaan fasilitas pendukung, serta pengalokasian dana desa yang difokuskan pada sektor pertanian dan peternakan. Strategi tersebut mencerminkan upaya pemerintah desa dalam menjalankan fungsi regulator, fasilitator, dan dinamisor secara terpadu guna mendorong partisipasi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Meskipun demikian, strategi pendampingan dan sosialisasi masih perlu diperkuat agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan berkelanjutan.
2. Kolaborasi antara Pemerintah Desa Oeletsala, petani, dan pihak luar telah terjalin dengan baik dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan potensi unggulan desa. Pemerintah desa berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan instansi pendukung seperti dinas pertanian, dinas peternakan, serta lembaga swasta. Melalui kerja sama ini, masyarakat memperoleh bantuan sarana produksi, pendampingan teknis, dan akses pemasaran yang lebih luas.

Saran

1. Bagi Pemerintah Desa, diharapkan terus memperkuat peran dalam mendampingi masyarakat melalui pelatihan, penyediaan sarana pendukung, dan perluasan jaringan pemasaran agar potensi unggulan desa dapat berkembang secara berkelanjutan.
2. Bagi Masyarakat Desa, perlu meningkatkan partisipasi dan inovasi dalam mengelola potensi lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
3. Bagi Pihak Terkait (Dinas dan Lembaga Swasta), diharapkan memberikan dukungan berkelanjutan dalam bentuk bantuan modal, pelatihan, dan akses pasar untuk memperkuat perekonomian Desa Oeletsala secara menyeluruh.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian dengan meninjau peran pemerintah desa dalam sektor potensi unggulan lainnya selain pertanian, seperti peternakan dan UMKM, serta menggunakan pendekatan yang lebih mendalam atau metode campuran (kualitatif dan kuantitatif) untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif dan objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afandi, M., & Afandi, S. A. (2018). Implikasi Tata Kelola Sektor Publik Era Reformasi. Tunas Gemilang.
- [2] Agus. (2020). Membangun Desa Wisata. In <https://Muaraenimterkini.Com>. <https://muaraenimterkini.com/membangun-desa-wisata/>
- [3] Bauer, Jeffrey C. (2003) Role Ambiguity and Role Clarity: A Comparison of Attitudes in Germany and the United States (55-56)

- [4] Bawono, I. R. (2019). Optimalisasi potensi desa di Indonesia. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- [5] Brigitte Lantaeda, S., Dkk, Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2002). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 04(048), 243.
- [6] Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.
- [7] Donald Finit, dkk, Kampus, A., Adisucipto, J., & Timur, N. T. (2025). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Universitas Nusa Cendana, Indonesia.
- [8] Dougherty, T. W., & Pritchard, R. D. (1985). The measurement of role variables: Exploratory examination of a new approach. Organizational behavior and human decision processes, 35(2), 141-155.
- [9] Eko, M. (2008). SOSIOLOGI PEDESAAN PENGANTAR UNTUK MEMAHAMI MASYARAKAT DESA.
- [10] Fikran S. Bangkole.dkk. (2024). Analisis Peran Sektor Pertanian dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Regional Kecamatan Kupang Barat. Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE), 5(2), 333-343. <https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i2.5743>
- [11] Guritno, B. (2011). Pola tanam di lahan kering. Universitas Brawijaya Malang, 68.
- [12] Hakim, M. L., Qurbani, I. D., & Dkk. (2022). Analisis normatif pengaturan pembentukan desa adat. Jurnal Hukum Tata Negara & Administrasi Negara, 1(2), 92-106.
- [13] HAW, W. (2003). Otonomi Desa (Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh). Jakarta: PT. Rja Grafindo Persada
- [14] Jamaludin, A. N. (2016). Sosiologi Pembangunan. In Pustaka Setia Bandung.
- [15] Karsono, B., & Syauket, A. (2021). Buku Ajar Otonomi Daerah Perspektif Human Security dalam Negara Demokrasi.
- [16] Khairiyati, L. dkk. (2022). Buku Ajar Pengantar Lingkungan Lahan Basah. In Suparyanto dan Rosad (2015).
- [17] Kuncoro, M. (1997). Ekonomi pembangunan: teori, masalah, dan kebijakan.
- [18] Lexy Febrison Malani, & Dkk. (2024). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI MASYARAKAT DESA MEDE KECAMATAN TOBELO UTARA KABUPATEN HALMAHERA UTARA. Journal of Marketing Management Research, 29(2), 1-24. <https://doi.org/10.37202/kmmr.2024.29.2.1>
- [19] Meila Puspa Piura, Tasya Adelia, Abdul Aziz Maulana, Rafika Sari, Mgs. Prima Putra Darma, & Endah Dewi Purnamasari. (2023). Analisis Potensi Unggulan Desa Pada Sektor Pertanian Yang Ada Di Desa Lubuk Enau Kecamatan Lembak. Jurnal Abdimas Mandiri, 7(2), 115-121. <https://doi.org/10.36982/jam.v7i2.3239>
- [20] Mone, I. M., Tamen, N., & Tiwu, M. I. H. (2024). Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pemberdayaan UMKM Tenun Ikat di Kota Kupang (Studi Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kupang). 4, 6791-6801.
- [21] Myint, H., & Krueger, A. O. (2016). Economic Development. Encyclopedia Britannica.
- [22] Ndraha, Taliziduhu, 2011. Kybernology ilmu pemerintahan baru, Jakarta: PT Rineka cipta.

-
- [23] Nikmatul, Masruroh, Parnomo, A. (2018). Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan. <http://ejournal.iain-jember.ac.id/index.php/fenomena/article/download/771/616>
 - [24] Pardosi, L. M. (2022). Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Denai Lama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.
 - [25] Qurbani, I. D., & Hakim, M. L. (2022). Analisis normatif pengaturan pembentukan desa adat. *Grondwet*, 1(2).
 - [26] Rahmandari, I. A., Dkk, Kahfi, R. A., & Ahmad, L. (2024). ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA DI DESA DASAN GERIA KECAMATAN LINGSAR KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2021. 2.
 - [27] Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Journal Governance*, 1(2), 1–9.
 - [28] Ramadhani, A. (2019). Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Sidoarjo Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. *Skripsi*, 1–98.
 - [29] Rukmana, R., & Yuniarsih, Y. (2001). *Aneka Olahan Ubi Kayu*. Yogyakarta: Kanisius.
 - [30] Rosma, (2017). Fungsi Kepemimpinan Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Bagian Humas Dan Protokol Sekretariat Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 5(3), 139. <https://doi.org/10.52239/jar.v5i3.879>
 - [31] Saharuddin, S. (2006). Analisis Ekonomi Regional Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisis*, 3(1), 11-24.
 - [32] Saparin, S. (1972). *Tata pemerintahan dan administrasi pemerintahan desa*.
 - [33] Sedana, G. (2021). Menuju Pembangunan Pertanian Berkelestarian. ... Inovasi Dalam Penelitian Sains, Teknologi Dan ..., 8–15. <https://eproceeding.undwi.ac.id/index.php/inobali/article/view/51>
 - [34] Soekanto, S. (2005). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
 - [35] Sondang P, Siagian. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
 - [36] Susanti, S. (2015). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sukamaju Kecamatan Tenggarong Seberang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 3(3), 898–912.
 - [37] Sutedjo, M. M., & Kartasapoetra, A. G. (2010). *Pengantar Ilmu Tanah: Terbentuknya tanah dan tanah pertanian*. Rineka Cipta.
 - [38] Suyanto, B., & Sutinah. (2005). *Metode penelitian sosial*. Kencana.
 - [39] Todaro M.P, Smith S.C. 2011. *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Kesebelas. Jakarta: Erlangga
 - [40] Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta.
 - [42] Ummah, M. S. (2019). *Buku Ekonomi Publik*. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PE

MBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

- [43] Wahyuni D. (2017). Penguatan kelembagaan petani menuju kesejahteraan petani. Singkat, 9(17), 9–12. [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat-IX-17-I-P3DI-September-2017-218.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-IX-17-I-P3DI-September-2017-218.pdf)
- [44] Widodo, T. (2006). Perencanaan pembangunan: aplikasi komputer (era otonomi daerah). Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 48.
- [45] Yamin, M., & Haryanto, A. (2017). Teori Pembangunan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.